

## Dinamika Gerakan Islam di Indonesia: Antara Salafi, Fundamentalis, Islmais Atau Post-Islamis

Ihwan Sormin<sup>1</sup>, Abdul Manaf Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: [sorminihwan@gmail.com](mailto:sorminihwan@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.manaf.harahap25@gmail.com](mailto:abdul.manaf.harahap25@gmail.com)<sup>2</sup>

### *Abstract*

This research will examine how movements, ideologies and Islamic understandings are transformed from Salafi, Fundamentalist, Islamist to Post-Islamist movements. The researcher also wants to see how the fundamentalist salafi movement circulated until it finally became Islamic and how the differences between the two movements are. Then the researcher wants to see and analyze where the position of the movement and understanding of Islam in Indonesia is between Islamists and post-Islamists. This research is library research by collecting data from libraries, both books and other journal articles. The results of the study show that the shift in the Islamic movement is divided into Salafism, Fundamentalism, Islamism and Post-Islamism. Initially the Salafism movement had the same spirit as Fundamentalism, namely purifying Islamic teachings from all forms of amaliyah that smelled of heresy. In the Islamist movement, the Wahhabi group began to touch the foundations of politics and power with the spirit of establishing an Islamic state. The Islamic movement in Indonesia has begun to move towards Post-Islamism as evidenced by the evaluation of several Islamic political parties using moderate Islam as their party ideology.

**Keywords:** *Ideology, Islamis, Post-Islamis*

### *Abstrak*

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana transformasi gerakan, ideologi dan pemahaman islam dari gerakan Salafi, Fundamentalis, Islamis hingga Post-Islamis. Peneliti juga ingin melihat bagaimana sirkulasi gerakan salafi fundamentalis hingga akhirnya menjadi islamis dan bagaimana perbedaan antara kedua gerakan tersebut. Kemudian peneliti ingin melihat dan menganalisis dimana posisi gerakan dan pemahaman islam di Indonesia antara Islamis dan Post-Islamis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *library research* dengan mengumpulkan data dari

pustaka baik itu buku dan artikel jurnal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran gerakan islam terbagi menjadi Salafisme, Fundamentalisme, Islamisme dan Post Islamisme. Awalnya gerakan Salafisme memiliki spirit yang sama dengan Fundamentalisme yaitu memurnikan ajaran islam dari segala bentuk amaliyah yang berbau bid'ah. Pada gerakan Islamisme kelompok wahabi ini mulai menyentuh sendi politik dan kekuasaan dengan spirit mendirikan negara islam. Gerakan islam di Indonesia sudah mulai bergerak ke arah Post-Islamisme terbukti dengan evaluasi beberapa partai politik islam dan organisasi islam dengan memakai islam moderat sebagai ideologi partainya.

*Kata Kunci: Ideologi, Islamis, Post-Islamis*

## PENDAHULUAN

Peristiwa yang sering menjadi bahan diskusi dalam hal keagamaan di Indonesia setelah rezim orde baru berakhir adalah menguatnya permintaan dari masyarakat islam dalam hal penerapan syariat islam dalam negara. Lebih jauh bahkan dalam konsep penerapan negara islam atau yang sering disebut dengan *islamic state*. Gerakan-gerakan dalam hal untuk penerapan syariat islam dalam segala aspek bahkan dalam hal ketatanegaraan yang sering digemborkan sebagai negara islam digerakkan atau kebanyakan dituntut oleh golongan atau kelompok islam yang fundamentalis atau islamis. Dalam melancarkan penerapan dan tuntutan syariah dalam bentuk negara tersebut terkadang bukan hanya dilakukan atau digerakkan dengan cara-cara yang damai bahkan melakukan tuntutan penerapan tersebut dengan cara-cara yang radikal dan kekerasan dengan memobilisasi massa.

Adanya faktor ketidakpuasan dengan keberadaan pemerintah yang mengadopsi sistem demokrasi atau sering mereka sebut dengan sistem sekuler menjadi salah satu dari sekian banyak alasan golongan fundamentalis atau kelompok islamis menuntut penerapan syariat islam secara mutlak bahkan dalam hal sistem ketatanegaraan. Martin Van Bruinessen menjelaskan bahwa ada dua penyebab munculnya kelompok fundamentalis dan islamis setelah jatuhnya pemerintahan orde baru. Pertama disebabkan oleh gagalnya pemerintah berkuasa dalam mengelola negara sehingga pada waktu itu terjadi marginalisasi yang sangat parah, martin menyebutnya sebagai *political marginalization*. Sedangkan penyebab kedua yaitu menguatnya persatuan dan persaudaraan antar sesama muslim diseluruh dunia apalagi di bagian Asia dan timur tengah, sehingga berimbas dan sampai ke Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim.

Kelompok fundamentalis dan islamis dapat diinterpretasikan kepada kelompok dengan ideologi yang sama di Indonesia seperti HTI, FPI, KAMMI dan MMI.<sup>1</sup> Terbukti dengan organisasi tersebut eksis setelah pemerintahan orde baru tumbang. Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di India ada Jama'ah Islamiyah. Menerapkan syariat islam bahkan mendirikan negara islam menjadi ideologi pokok dalam dua organisasi besar tersebut.

Gerakan golongan fundamentalis dan islamis kontemporer berbeda dengan kelompok pendahulunya seperti Salafi-Wahabi. Salafi-Wahabi awalnya dikenal dengan pergerakan dakwahnya untuk memurnikan ajaran islam atau purifikasi terhadap ajaran islam. Dalam pengertian menjalankan dakwah sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh nabi dan sesuai yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist secara murni. Sehingga kelompok ini ingin memurnikan ajaran islam dari amaliah-amaliah yang tidak pernah dikerjakan oleh nabi atau bid'ah yang mereka anggap menyimpang.

Setelah melewati beberapa periode kelompok Salafi-Wahabi ini mulai meluas dan menyebarkan sayap dan ideologinya sampai ke negara-negara yang mayoritas islam dan pada akhirnya kelompok yang awalnya hanya menyentuh bidang dan bagian dakwah dalam pemurnian ajaran islam, kelompok dengan ideologi fundamentalis ini pada akhirnya mulai menyentuh bagian politik kekuasaan sehingga ada orientasi dalam penerapan syariat islam bahkan untuk mendirikan negara islam.

Wacana dalam penerapan syariat islam bahkan pendirian negara islam terus digemborkan, apalagi negara yang mayoritas islam masih mengadopsi negara demokrasi. Wacana penerapan syariat islam ini sampai pada masa reformasi sekarang sehingga sampai ikut mewarnai jalannya politik sosial di Indonesia. Meskipun suara dari kelompok ini hanya mewakili sebagian kecil dari masyarakat Indonesia, akan tetapi wacana dalam penerapan syariat islam dan mendirikan negara islam tidak pernah mati bahkan ikut mewarnai perjalanan politik Indonesia sampai hari ini.<sup>2</sup>

Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat apakah gerakan islam di Indonesia yang dimulai dari gerakan dan pemahaman Salafi-Wahabi sampai pada titik fundamentalis hingga islamisme sudah sampai pada post-islamisme. Namun sebelum menganalisis apakah gerakan dan pemahaman islam di Indonesia sudah sampai pada tahap post-islamisme. Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana keterhubungan gerakan Salafi-Wahabi sampai ke gerakana

---

<sup>1</sup> Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LP3S & KITLV, 2008), hlm. 42.

<sup>2</sup> Komaruddin Hidayat, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam Di Bumi Nusantara* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 28.

fundamentalist bahkan sampai ke gerakan islamis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menganalisis sejarah gerakan islam dari Salafi, Fundamentalis, Islamis hingga Post-Islamis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori post-islam Asep Bayat dan teori Gerakan Sosial sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, artikel jurnal dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Salafi, Fundamentalisme dan Islamisme

Secara lebih luas, makna salaf adalah kembali kepada ajaran islam awal sebagaimana dalam risalah awalnya oleh Nabi Muhammad SAW para sahabat dan tabi'in. Para salaf memahami islam sebagaimana yang diprkatkan dan yang dilakukan oleh nabi. Mereka menganggap islam murni itu yang dibawa dan langsung diprkatkan oleh nabi. Kaum salaf idealis inilah kemudian yang disebut sebagai kaum dan kelompok salafi.<sup>3</sup>

Kebanyakan ulama sepakat dan berpendapat bahwa dalam waktu tiga abad setelah meninggalnya Nabi Muhammad, salaf terbagi menjadi tiga generasi awal islam yaitu, pada masa para sahabat nabi sampai pada masa sahabat Anas ibn Malik (w. 9 H./710 M.), tabi'in (180 H./796 M.) dan berakhir pada Imam Ahmad ibn Hambal (169- 241 H), dan sekaligus menjadi akhir dari generasi salaf.<sup>4</sup> Ketiga generasi ini merupakan salaf yang tidak hanya memahami islam tetapi melakukan dan memprkatkan islam sesuai dengan apa yang diprkatkan oleh nabi.

Dilihat dari munculnya kelompok salaf dan fundamentalis, diawal sudah dijelaskan bahwa ideologi kelompok salaf lahir dari timur tengah, khususnya di arab saudi. Berbeda dengan kelompok salaf yang lahir dari belahan dunia timur, aliran kelompok fundamentalisme lahir dari belahan dunia barat. Fundamentalis secara etimologi berasal dari kata fundamen yang berarti asas atau dasar-dasar. Namun secara terminologi fundamentalis yaitu suatu kelompok atau aliran pemahaman agama yang fokus menafsirkan teks-teks suci dengan hanya berdasarkan pemahaman tekstual atau meminjam kata Amin Abdullah kelompok pemahaman keagamaan dengan penafsiran teks-teks secara literak.<sup>5</sup> Selain Amin Abdullah, Gellner menyebutkan bahwa wacana fundamentalisme merupakan

<sup>3</sup> Chris Chaplin, *Salafism and the State Islamic Activism and National Identity in Contemporary Indonesia* (Copenhagen: Nias Press, 2021), hlm. 114.

<sup>4</sup> John L Esposito, "Salafiyah," *Oxford University Press* 5 (1995): 105.

<sup>5</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin, Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022), hlm. 116.

pemahaman keagamaan yang memegang teguh dalam bentuknya secara tekstual tanpa interpretasi.<sup>6</sup> Dari pengertian dari beberapa tokoh tersebut dapat dikatakan bahwa fundamentalisme itu adalah suatu pemahaman keagamaan yang memahami agama secara tekstual dan literer sesuai dengan apa yang sudah qath'i dalam kitab suci dengan apa adanya tanpa ada penambahan dan pengurangan.

Penyebutan konsep fundamentalisme keagamaan pertama kali muncul dalam agama kristen pada saat konferensi Bible pada tahun 1978 sebagaimana acara ini diselenggarakan di New York.<sup>7</sup> Dalam konferensi ini dihadiri oleh aktivis gereja sehingga menghasilkan komitmen yang dikenal dengan 9 prinsip fundamental. Pada akhirnya dalam kesepakatan itu mereka yang bersepakat menamakan diri sebagai kelompok fundamentalisme dan kelompok yang kontra dengan kesepakatan tersebut menyebut mereka kelompok zindic/heretic atau bid'ah.

Dalam konferensi itu tentu ada kelompok yang kontra atau tidak sependapat dengan kesepakatan tersebut, kelompok yang kontra dengan kesepakatan menjelaskan bahwa kelompok fundamentalis tersebut tidak mewakili agama kristen yang dianut secara keseluruhan. Mereka yang tidak setuju dengan konferensi itu lebih setuju bahwa mereka dikenal sebagai Kristen saja atau Kristen sejati.<sup>8</sup>

Walaupun wacana pemahaman keagamaan fundamentalis lahir dan pertam kali dikenal di Amerika Serikat oleh agama kristen, namun pada akhirnya ideologi dan pemahaman fundamentalis juga lahir dan mengalir sampai ke agama, Hindu, Budha dan bahkan Islam. Fenomena fundamentalis ini sampai kepada seluruh agama untuk membendung pengaruh modernisasi. Sehingga pemahaman fundamentalis ini menegaskan dan mengarahkan penganutnya untuk kembali kepada teks-teks suci yang asli dan murni tanpa ada interpretasi dan penafsiran.

Dalam agama Islam misalnya, penganut paham keagamaan fundamentalis salaf dimulai saat Imam Ahmad bin Hambal mengkritik keras kelompok Mu'tazilah dengan pemikiran rasionalitasnya. Sehingga dengan semangat fundamentalis Ahmad bin Hambal bersama dengan pengikutnya berusaha memurnikan dan mensucikan pemahaman agama dari perilaku dan tindakan

---

<sup>6</sup> Ernest Gellner, *Postmodernisme, Reason and Religion*, (London: Rotledge, 1992), hlm. 106.

<sup>7</sup> Syafiq Hasyim, "Fundamentalisme Islam: Perebutan Dan Pergeseran Makna," *Tashwirul Afkar* 1 (2002): hlm. 8.

<sup>8</sup> Neng Isma et al., "Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al ' Qur ' an" 2, no. 1 (2023): 1299–1310.

takhayyul, khurafat dan bid'ah serta segala amaliyah yang tidak pernah dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat nabi.

Dari masa Ahmad bin Hambal, paham keagamaan fundamentalis terus berlanjut sampai masa modern. Beberapa nama tokoh fundamentalis pada masa itu seperti Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn Abdul Wahab dan Ibn Qayyim al Jauziyyah. Mereka adalah sebagian tokoh yang terus berusaha dan memiliki semangat untuk memurnikan atau puritanisme akidah islam dari segala bentuk amaliyah yang memiliki unsur bid'ah. Dari spirit ideologinya tersebut pada saat itu mereka sebagai kelompok fundamentalisme mulai memperkenalkan dan menggemborkan istilah "kembali pada Al-Qur'an dan Hadist.

Berbeda dengan istilah fundamentalisme, jargon islamisme pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh seorang filosof dari negara Prancis, yaitu Voltaire. Beliau menggunakan istilah Islamisme sebagai pengganti dari istilah dengan pengertian yang sama sebelumnya yaitu Mohammadisme sebagai istilah yang dikenal oleh orang barat atau Eropa sebagai penyebutan untuk agama orang Arab. Namun penggunaan istilah Islamisme setelah dikenalkan oleh Voltaire, lama tidak digunakan. Isu-isu istilah Islamisme dikenal akhir-akhir ini pasca-perang dingin, sehingga islam politik atau Islamisme muncul dan dikenal dan terlibat sebagai gerakan politik International. Sehingga pada akhirnya istilah Islamisme sangat dekat dengan cendikiawan dan jurnalis. Hingga pada akhirnya secara umum istilah Islamisme dikenal sebagai gerakan, pemahaman keagamaan, gerakan politik ummat islam dengan perbedaan dan keunikannya diantara ideologi politik lainnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana istilah Islamisme dikenal pertama kali di dunia barat, namun beberapa para tokoh dan cendikiawan memiliki perbedaan pendapat tentang pengertian Islamisme. Donal Emmerson misalnya mengartikan Islamisme sebagai suatu gerakan ummat muslim untuk melaksanakan agenda Islam. Berbeda dengan Donal Emmerson, secara lebih luas Graham Fuller menjelaskan bahwa Islamisme merupakan Islam Politik yang diusung oleh kalangan yang percaya bahwa islam memiliki sistem politik sendiri dan bagaimana sebuah negara dikelola dalam konteks dunia islam kontemporer yang dalam mewujudkannya dilakukan dengan berbagai cara.<sup>10</sup>

Secara lugas dan jelas Asef Bayat menjelaskan bahwa Islamisme adalah gerakan islam yang berusaha untuk membangun tatanan islam dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Ahmad N. Permata, *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006*, (Tesis, Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008), hlm. 18.

<sup>10</sup> Babun Suharto, "Articulation of the Archipelago's Islamic Education Thought," *International Journal of Islamic Boarding School* Vol. 1, no. No. 1 (2023): 57-66.

negara islam dan menerapkan syariat islam sebagai nilai moralitas dalam sebuah negara yang dibentuk. Kemudian Asef Bayat dalam pengertiannya menjelaskan bahwa gerakan Islamisme memiliki dua visi. Pertama, gerakan Islamisme berupaya untuk menggambarkan interpretasi Islam yang mampu menjawab kekurangan-kekurangan dalam ranah politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, dalam pandangan Islamisme, Islam diidealisasikan sebagai sistem kepercayaan yang sempurna, lengkap dengan pola politik, norma budaya, kerangka hukum, dan susunan ekonomi yang unggul.<sup>11</sup> Gerakan Islamisme ini sampai pada zaman kontemporer dengan contoh tokohnya seperti Hasan Al Banna yang dikenal sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin yang menurut Noorhaidi Hasan, organisasi Ikhwanul Muslimin belum radikal sampai akhirnya Ikhwanul Muslimin dimasuki oleh Sayyid Qutb sehingga organisasi itu menjadi lebih radikal dalam menjalankan agendanya. Hasan Al Banna, Sayyid Qutb yang merupakan adri Mesir dan Abu A'la al Maududi dari Pakistan merupakan tokoh dan pendukung ideologi gerakan Islamisme.

### **Dari Ideologi Salafi, Fundamentalisme ke Gerakan Islamisme**

Secara umum ada dua pendekatan dalam menyelami kebenaran agama yang sangat populer dan dikenal oleh para peneliti dan cendekiawan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan yang menggunakan rasionalitas atau akal pikiran. Kelompok ini dikenal dengan kelompok Mu'tazilah.

Kelompok Mu'tazilah menggunakan akal pikiran dalam menyelami kebenaran makna dalam setiap teks keagamaan. Sedangkan pendekatan kedua adalah kelompok yang menolak pendekatan rasional dan akal pikiran dalam memaknai teks keagamaan. Kelompok ini diwakili oleh kaum salaf dengan berfokus pada tekstualitas keagamaan. Kelompok ini mewajibkan rasio dan akal pikiran manusia untuk tunduk terhadap teks keagamaan dan memeberikan batas terhadap akal dan rasio dalam menginterpretasikan teks keagamaan seperti Al Qur'an dan Hadist.

Tokoh dalam kelompok yang menolak pendekatan rasionalis dan akal pikiran atau yang disebut kelompok Mu'tazilah dan peletak awal munculnya pemahaman keagamaan tekstualis adalah Imam Ahman Ibn Hambal. Beliau bukan hanya menolak pemahaman keagamaan yang menggunakan akal pikiran manusia, tetapi juga semua bentuk aliran rasional menjadi objek sasaran kritiknya. Model kelompok pemahaman keagamaan tidak hanya berhenti pada Imam Ahmad Ibn Hambal, akan tetapi terus berlanjut dan diteruskan oleh pengikut-

---

<sup>11</sup> Asef Bayat, *Pos-Islamisme* (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 14.

pengikutnya sampai lahir tokoh-tokoh yang eksis yang memiliki pemahaman keagamaan yang sama dengannya.

Beberapa nama tokoh paham salaf di era kontemporer yang eksis dalam melanjutkan corak pemahaman Ahmad Ibn Hambal seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al Jauziyyah hingga Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tidak heran bahwa Martin Van Bruinessen menyebut mereka sebagai bapak Fundamentalisme Islam.<sup>12</sup> Wacana utama kelompok salaf ini adalah kembali kepada Al Qur'an dan Hadist sebagaimana dipraktekkan atau dicontohkan oleh nabi dan para sahabat.

Keberadaan kelompok pemahaman keagamaan salafi dapat dilihat dari cara berpakaian mereka di ruang publik. Cara berpakaian kelompok ini cenderung bersifat eksklusif bahkan menjadi pakaian dalam beraktifitas dalam sehari-hari. Perempuan misalnya cenderung memakai busana tertutup secara keseluruhan dengan menggunakan niqab.<sup>13</sup> Bahkan pakaian perempuan dapat diidentifikasi dengan pakaian mereka yang cenderung berwarna hitam. Sedangkan untuk busana laki-laki dapat diidentifikasi dengan cenderung memakai baju jubah yang berukuran panjang, memakai celana cingkrang, memakai surban dan biasanya merawat jenggot panjang. Dari cara berpakaian kelompok salaf ini kemudian menandakan bahwa mereka tetap komitmen dalam menjalankan islam secara murni sebagaimana generasi awal islam yang dipraktekkan oleh nabi dan para sahabat.

Gerakan pemahaman salafi ini cenderung eksklusif, dibuktikan dengan kelompok mereka menarik titik jarak dengan kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan mereka. Selain itu juga cara berpakaian mereka yang secara khusus berbeda dengan kelompok islam lainnya. Namun hubungan diantara sesama mereka sangat terjalin baik dan tidak se eksklusif dengan kelompok lain. Dalam arti kelompok salafi ini tidak terlalu mudah bergaul dengan kelompok atau komunitas yang tidak sekomunitas dan sepemahaman dengan mereka.

Berbeda dengan salafi kontemporer, pada posisi awal kelompok salafi ini hanya fokus pada spirit dan semangat pemurnian ajaran dan pemahaman islam dari setiap amaliyah yang berbau bid'ah, sehingga pada awalnya kelompok ini tidak bersentuhan dengan urusan politik atau pandangan politik tertentu. Mungkin spirit awal ini dipengaruhi oleh tokoh dari kelompok salaf yaitu Ibn Taymiyyah yang menegaskan bahwa dari perspektif teologis tidak boleh memberontak terhadap pemerintahan muslim yang sah, sehingga sikap mereka pada awalnya menghindar dari dinamika politik dan komitmen terhadap spirit

---

<sup>12</sup> Martin van Bruinessen, "Muslim Fundamentalism: Something to Be Understood or to Be Explained Away," *An Antology of Islamic Studies* Vol. 2 (2008): hlm. 90.

<sup>13</sup> Noorhaidi Hasan, "Salafisme, Education and Youth Saudi Arabia's Campaign For Wahabism in Indonesia," *Oxford University Press*, 2022, 135-57.



pemurnia ajaran islam dari segala bentuk amaliyah yang berbau bid'ah dan mereka dalam melakukan dakwah dengan cara daurah dan halaqah.<sup>14</sup>

Sementara menurut Noorhaidi Hasan Salafi di Indonesia masa sekarang telah berubah menjadi salafi yang adaptif, komunikatif dan produktif. Lewat pendekatan "Habitus" milik Pierre Bordieu Prof. Noorhaidi membuat istilah baru bagi gerakan salafi model ini dengan istilah "Post Salafi Islam".<sup>15</sup>

Hal yang sama dengan gerakan pemahaman keagamaan salafi awal bahwa kelompok ini tidak mengakomodasi gerakan dakwahnya terlibat dalam nuansa politik praktis, salafi kontemporer (wahabisme) atau yang sering dikenal dengan fundamentalisme islam juga tidak mengafirmasi gerakannya terlibat dalam hiruk pikuk politik praktis. Karena mereka meyakini bahwa gerakan pemurnian ajaran islam apabila menggunakan politik sebagai alat maka berarti mereka meyakini bahwa tidak mempraktekkan pemurnian ajaran islam sebagaimana dianjurkan oleh salah satu tokoh mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih jelas beliau menjelaskan bahwa dakwah islam apabila menjadikan politik sebagai alatnya maka itu merupakan kekeliruan yang besar dan merupakan bagian dari bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran pemurnian dari segala khurafat.

Menurut Noorhaidi Hasan gerakan dan paham salafisme kontemporer inilah yang menjaga dan menjunjung tinggi spirit pemurnian islam. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa salafisme kontemporer yang muncul pada abad ke 18 merupakan lanjutan dari doktrin wahabisme, sebagai mana doktrin ini dari tokoh salaf yaitu Muhammad Ibn Abdul Wahab. Gerakan dan doktrin salafi kontemporer atau yang disebut orang sebagai wahabisme ini memiliki agenda yang sama sebagaimana gerakan salafisme awal yaitu melaksanakan dakwah untuk pemurnian ajaran islam dari segala bentuk khurafat, takhayyul dan segala bentuk amaliyah yang berbau bid'ah. selain itu kelompok ini juga menentang segala bentuk dan praktek thariqoh, sufisme dan segala bentuk yang tidak sesuai dengan ajaran islam murni sebagaimana awal islam pada masa nabi dan para sahabat. Dari kegiatan dan aktivitas dakwah ini kemudian kelompok ini bisa secara tegas mengelompokkan mana yang dikatakan orang beriman dan kafir. Kelompok ini juga menolak keras eksistensi Taqlid, karena pendapat mereka semua harus kembali ke Al Qur'an dan Hadist sebagaimana islam awal.

Akibat dari persamaan semangat salafi kontemporer atau yang disebut dengan wahabisme dengan semangat dakwah salafi klasik awal, maka kelompok wahabisme fokus menyusun kembali dan menghimpun kembali ajaran dan

---

<sup>14</sup> Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*, hlm. 31.

<sup>15</sup> Hasan, "Salafisme, Education and Youth Saudi Arabia's Campaign For Wahabism in Indonesia."

pemahaman keagamaan islam yang keluar dari Al Qur'an dan Hadist dan mengembalikannya sesuai dengan amaliyah yang dikerjakan oleh nabi dan para sahabat sebagaimana generasi awal islam sebagaimana dengan pemikiran yang gagas oleh tokoh salafi sebelumnya seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim Jauziyyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka tidak mengherankan masa kontemporer sekarang pengikut doktrin dan gerakan wahabisme dalam kegiatan dakwahnya selalu merujuk pada tokoh wahabi kontemporer seperti Muhammad Nashir Albani dan Abdul Aziz Abdullah Ibn Bazz.

Sebagaimana sebelumnya Martin menyebutkan bahwa ideolog dan tokoh salaf awal merupakan bapak fundamentalisme islam, para cendekiawan studi islam sebagaimana Martin Van Bruissenan dan Prof. Noorhaidi Hasan menyematkan kelompok salafi klasik dan slafi kontemporer atau wahabi sebagai satu identitas dan pemahaman keagamaan atau yang disebut pemahaman keagamaan fundamentalisme islam. Fundamentalisme islam mengarah pada identitas pemahaman keagamaan islam yang lebih condong menginterpretasikan Al Qur'an dan Hadist nabi dengan metode tekstual literer yang kaku.<sup>16</sup>

Adapun ciri dan identitas kelompok fundamentalisme islam seperti bersifat eksklusivisme dan tertutup, menolak perubahan dan perkembangan, mengikut pada tradisi, dan menolak mazhab. Maka tidak aneh jika kelompok ini tidak segan menghabisi dan pemberangusan terhadap kritik dan perbedaan pendapat terhadap mereka.

Ciri yang dipaparkan di atas menyebabkan kelompok fundamentalisme islam ini identik dan dicirikan dengan kelompok yang radikal, karena dalam melakukan dakwah kelompok ini sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor bahkan melakukan tindakan kekerasan yang amoral terhadap rival dan kelompok politik lain yang berbeda pendapat dan pandangan dengan mereka sebagaimana dituliskan oleh Akbar S. Ahmed dalam bukunya yang berjudul *Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise*.<sup>17</sup>

Dari pemaparan diatas jelas bahwa secara umum tidak ada perbedaan antara kelompok salafisme dan fundamentalisme islam. Keduanya hanya saling melengkapi akibat dari perbedaan masa dan zaman antara keduanya. Jika salafisme awalnya lahir untuk menentang kelompok Mu'tazilah yang menggunakan pendekatan rasionalitas dan akal pikiran dalam menginterpretasikan ajaran islam dan isi kitab suci Al Qur'an dan Hadist

---

<sup>16</sup> Martin V an Bruinessen, "Indonesian Muslims In A Globalising World Westernisation Arabisation and Indigenising Responses," *RSIS Working Paper*, S. Rajaratnam School of International Studies, no. May (2018).

<sup>17</sup> Akbar S Ahmad, *Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise* (New York: Routledge, 1992), hlm. 112.

sedangkan kelompok fundamentalisme lahir untuk menentang segala bentuk amaliyah yang berbau bid'ah dan tidak sesuai dengan isi Al Qur'an dan yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat sebagaimana generasi awal islam. Sehingga dapat disimpulkan kedua kelompok ini masih memiliki spirit yang sama yaitu mengarahkan masyarakat untuk kembali kepada Al Qur'an dan Hadist Nabi.

Berbeda dengan Salafisme dan Fundamentalisme, Islamisme menjadi gerakan alternatif dalam melanjutkan paham keagamaan islam. Namun berbeda dengan gerakan sebelumnya dimana Fundamentalisme yang spiritnya memurnikan ajaran islam dari segala bentuk dimensi tradisi dan amaliyah berbau bid'ah yang tidak sesuai dengan AlQur'an dan Hadist nabi, Islamisme mulai bergerak dan menyentuh bagian dimensi politik.

Islamisme merupakan suatu aliran dalam Islam yang timbul sebagai dampak sosial politik di berbagai wilayah dunia, terkait dengan tindakan sekelompok orang. Gerakan dan kelompok Islamisme merujuk dan identik dengan ideologi islam dan pembentukan sebuah negara islam atau *islamic state*. Pengikut dan aktivis kelompok ini berkeyakinan bahwa antara politik dan islam tidak bisa dipisahkan. Islam dan politik menurut pengikut kelompok ini merupakan satu kesatuan (*din wa daulah*). Maka sebutan untuk orang dan pengikut kelompok ini disebut dengan ideolog kelompok islamis.

Pemikir dan tokoh dalam kelompok islamis misalnya seperti Al Maududi sebagai tokoh salafi setelah Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al Maududi misalnya tidak setuju dan sangat menentang sistem demokrasi. Karena menurutnya dalam sistem demokrasi kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga dalam menentukan kebijakan dan jalannya pemerintahan ditentukan oleh rakyat. Menurut Al Maududi sistem ini tidak sesuai dengan islam, karena dalam islam menurutnya yang memegang otoritas tertinggi adalah tuhan Allah Swt. Dalam konteks ini manusia tidak boleh tunduk terhadap sesama manusia, akan tetapi tunduk terhadap ketetapan Allah. Al Maududi menyebut sistem ini dengan sistem *theo democracy* atau *hakimiyah ilahiyah* yang dapat diartikan sebagai pemerintahan demokratis berlandaskan ketuhanan.<sup>18</sup>

Menurut Al Maududi, dalam islam tidak hanya diajarkan tentang dimensi hukum ibadah seperti sholat, puasa zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi menurutnya, islam harus juga melaksanakan dan menerapkan hukum negara. Lebih jelas menurutnya untuk menegakkan hukum Allah dengan sempurna, maka harus juga mendirikan institusi negara yang berdasarkan hukum Allah, sehingga dalam negara dapat mengaplikasikan hukum syariat islam sebagai

---

<sup>18</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Islam Dan Konsepsi Kontemporer Mengenai Negara: Gagasan Jama'at Al-Islami Di Pakistan Dan Masyumi Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.82.

undang-undang dalam sebuah negara. Menurut al Maududi, impian untuk mewujudkan negara yang tenteram, teratur, dan damai merupakan aspirasi yang diidamkan oleh Islam itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam al Qur'an.

Pendapat Al Maududi sejalan dengan tokoh pendahulunya yaitu Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa islam merupakan kelompok sistem sosial, dan yang menjadi hukum tertinggi dalam hukum sosial adalah hukum Allah. Sehingga dalam tatanan sosial islam hukum Allah menjadi hukum tertinggi dan menjadi pemegang otoritas. Dari sini Ibn Taymiyyah memperjelas bahwa dalam menegakkan hukum Allah, manusia sebagai pemimpinnya disebut Ibn Taymiyyah sebagai khilafah atau wakil tuhan di bumi. Dalam konsep ini Ibn Taymiyyah menganjurkan ummat islam wajib untuk mentaati pemerintahan yang menjalankan syariat islam dan sebaliknya tidak wajib mentaati pemerintahan yang tidak menjalankan syariat islam.

Dalam sistem *theo democracy* ini warga negara terbagi menjadi dua golongan. Golongan warga islam dan golongan warga non muslim (dhimmi). Sehingga dari dua klasifikasi ini menjadi indikator untuk bisa dijadikan sebagai pemeimpin.

Salafi islam yang berubah menjadi fundamentalisme islam dan akhirnya menjadi islam politik atau islamisme diwujudkan oleh Al Maududi dalam sebuah organisasi besar atas pikiran-pikiran islamismenya. Terbukti Al Maududi mendirikan Jama'ah Islamiyah di India dan Hasan Al Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 Masehi.

Hasan Al-Banna sebagai otak di balik ideologi ini, berpendapat bahwa mendirikan Negara Islam melalui penerapan hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Tujuannya adalah untuk mencegah terus terperosoknya umat Islam akibat pengaruh ideologi sekuler Barat yang telah merusak kedalaman intelektual dan spiritual mereka. Dengan memilih Negara Islam sebagai opsi alternatif, diharapkan dapat mengakhiri situasi yang merugikan bagi umat Islam. Ini juga berarti bahwa ideologi Barat bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, Negara Islam yang mendasarkan konstitusinya pada syariat bukan hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga dianggap sebagai solusi. Dari konsep islamisme ini lah maka muncul jargon yang sangat terkenal yang disebut dengan "Islam adalah Solusi".<sup>19</sup>

Pada masa kepemimpinan Hasan Al Banna dalam Ikhwanul Muslimin gerakan ini belum masuk dalam aktivitas radikal. Sampai akhirnya Sayyed Qutb masuk dan memimpin Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya organisasi

---

<sup>19</sup> Gilles Kepel, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samarawi Di Dunia Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 19.

Ikhwanul Muslimin mulai melakukan tindakan-tindakan yang radikal akibat mengadopsi konsep Hakimiyyah atau kedaulatan tuhan Al Maududi sebagai pendahulunya.

Sebagai sebuah gerakan politik Islam dalam zaman kontemporer, Ikhwan al-Muslimin telah mengakui Islam sebagai titik rujukannya (al-dawlah al-madaniyyah bi al-marja'iyah al-Islamiyyah), dan pendekatan ini telah mendapatkan penerimaan yang luas di kalangan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia, sejumlah Muslim juga merespons dengan antusias. Dibuktikan dengan hadirnya organisasi Islam seperti HTI, FPI, KAMMI, MMI.<sup>20</sup>

Khususnya FPI dan HTI lahir setelah tumbang rezim orde baru. HTI misalnya sebelum dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo, terkenal dengan spiritnya secara terbuka dan vulgar untuk mendirikan negara khilafah dengan ideologi Islam. Hal yang sama juga berlaku untuk Front Pembela Islam (FPI). Melalui upaya gerakan dan penyebaran ajarannya, FPI mendorong penerapan hukum syariah Islam secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah, sesuai dengan pendekatan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebagai tindakan konkret dalam usaha dakwahnya, FPI dengan alasan melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tanpa ragu melakukan pengawasan dan tindakan tegas pada berbagai kesempatan di tempat-tempat di mana tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam terjadi, seperti hiburan malam, perjudian, dan sejenisnya. Langkah-langkah ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memaksa, bahkan beberapa di antaranya melibatkan penggunaan tindakan keras.

### **Ideologi dan Gerakan Islam di Indonesia Antara Islamis atau Post Islamis.**

Nurcholish Madjid atau yang sering dikenal orang dengan sebutan Cak Nur sebagai salah satu guru bangsa memiliki jargon yang menjadi perdebatan pada masanya. Jargonnya adalah "*Islam Yes Partai Islam No*". perdebatan pada waktu itu menghasilkan dua kelompok dalam pemaknaan perwujudan Islam dalam politik. Kelompok pertama dikenal dengan Islam formalistik yang menginginkan formalisasi dan penegakan simbol syariah dalam negara. Kelompok ini berpendapat antara politik dan Islam tidak bisa dipisahkan. Di lain pihak kelompok yang kedua yang dikenal dengan Islam Substantif tidak sepakat dengan Islam yang ingin formalisasi syariah dalam sebuah negara. Kelompok ini

---

<sup>20</sup> Ahmad Najib Burhani, "Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan," *Maarif Institute* Vol. 11, no. No. 2 (2016): 15–29.

juga tidak setuju dengan partai politik yang mengatasnamakan islam. Kelompok ini lebih mengutamakan substansi dari sebuah partai politik.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri islamisme di interpretasikan dalam partai politik. Spirit formalisasi islam dengan gerakan dan ideologi islam melalui parlemen sangat ramai setelah tumbanganya rezim orde baru yang sebelumnya dikenal menutup keran ekspresi ummat islam. Setelah jatuhnya pemerintahan orde baru, mulai muncul organisasi dan partai politik dengan simbol islam. Partai politik yang mensimbolkan diri sebagai partai islam. Agama menjadi simbol-simbol dalam politik. Partai yang dikenal dengan partai islam misalnya PPP, PKS, PKB dan PBB, begitu juga dengan HTI FPI sampai ada organisasi Komite Penegakan dan Penerapan Syariat Islam atau KPPSI.

Transisi masa mulai merubah perdebatan publik. Pada awal reformasi, begitu ramai dan hangat perbincangan dan diskusi tentang hubungan agama dan politik. Namun sekarang perdebatan dan diskusi masyarakat sudah mulai bertransformasi dari yang awalnya ramai mendiskusikan islam dan politik, sekarang sudah mulai ke tahap isu-isu ekonomi, politik, kesehatan dan budaya. Dari sini lah awal gerakan islamisme di Indonesia mulai bergerak menuju post islamisme sebagai akibat membuka diri dengan realitas politik di Indonesia. Salah satu penyebab masyarakat mulai membuka diri menjadi lebih moderat disebabkan oleh karakter bangsa Indonesia yang pluralis sehingga membuka diri atas perbedaan dan menerima realitas politik yang ada menjadi suatu keharusan.

Di Indonesia kita bisa melihat bagaimana sekarang ideologi partai islam dan organisasi kemasyarakatan Islam. HTI misalnya sebelum dibubarkan, menjabarkan bahwa ideologinya merupakan ideologi Pancasila sebagaimana dalam AD/ART sebelum dibubarkan. Kita juga bisa melihat bagaimana ketidak eksistensian organisasi KPPSI dalam memperjuangkan syariat islam terutama di Sulawesi Selatan yang kurang diterima oleh masyarakat keberadaannya karena dengan sistem yang kurang jelas.

Begitu juga dengan partai PKS, deklasrasi PKS yang disampaikan langsung oleh presiden partainya yaitu Sohibul Iman menyampaikan bahwa kita sekarang berada di masa post islamisme, sehingga menuntut kita untuk lebih terbuka dan menerima realitas politik yang ada. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa spirit memperjuangkan negara islam juga sudah lewat.<sup>22</sup>

Selain partai PKS, partai PPP dan PBB dapat dilihat bagaimana perolehan suaranya dalam pemilihan legislatif di setiap pemilu yang jauh selisihnya dari

---

<sup>21</sup> H Kamsi, "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara," *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2012): hlm. 83.

<sup>22</sup> Muhammad Adrian Gifariadi, "Post-Islamisme: Sebuah Pengantar" dalam <https://geotimes.id/opini/postislamisme-sebuah-pengantar/> diakses 20 Juni 2021

partai sekuler nasionalis. Tidak mengherankan jika partai PAN dan PKB lebih bertahan dan lebih terlihat aksistensinya karena sejak lama sudah mengevaluasi dan menerima realitas politik yang ada, sehingga dapat dilihat bagaimana interpretasi evaluasi dan keterbukaan itu dalam ideologi partai tersebut sebagaimana partai yang berideologi Islam moderat.

Fenomena tersebut diatas menjadi indikasi pergeseran ideologi, grakan dan pemahaman islam di Indonesia sudah mulai bergeser dari islamisme menuju post islamisme seperti yang disampaikan oleh Asef Bayat. Asef bayat juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang lebih cepat bergerak menuju post islamisme dibandingkan dengan negara masyarakat islam lainnya. Menurutnya hal demikian disebabkan oleh keadaan etnografi indonesia yang sangat pluralis dan beragam. Sehingga akan lebih mudah untuk berkompromi dengan negara atas keadaan realitas politik yang ada.<sup>23</sup> Menurut Post Islamisme tidak sekuler dan tidak anti islam. Menurut Bayat, suatu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan menggabungkan ajaran Islam dengan kemampuan untuk membuat pilihan secara bebas sehingga akan mencapai tingkat "modernitas alternatif", diperlukan konsep individualisme, sistem demokrasi, dan perubahan menuju tatanan modern.<sup>24</sup> Ini sejalan dengan ciri-ciri Post-Islamisme yang lebih terbuka dan toleran sehingga lebih berkompromi dengan negara dan lebih realistis merespon kegiatan program pemerintah dan yang lebih penting lebih toleran kepada kelompok yang berbeda. Dari paparan Asef Bayat ini Noorhaidi Hasan menyebutkan bahwa Post-Islamis merupakan sintesis dari Globalisasi dan Islamisme.<sup>25</sup>

Pergerakan Islam dan politik Islam kemudian dipengaruhi oleh dampak globalisasi dalam kancah kehidupan bernegara saat ini. Dalam penelitiannya mengenai politik Islam di Iran dan beberapa negara di Timur Tengah, Bayat berhasil memaparkan bagaimana bentuk-bentuk baru kebangkitan politik Islam muncul di kawasan, yang juga berdampak pada sejumlah negara lain, termasuk Indonesia. Menganalisis sejarah politik Islam sebagai aktivitas, dimulai dengan Islamisme yang sering tidak menyetujui kebijakan politik, khususnya kaum liberal. Kemudian Bayat berpendapat bahwa Post-Islamisme merupakan integrasi antara koservatisme dan modernisasi yang memiliki spirit perjuangan nilai islam sebagai substansi bukan sebagai formalisasi dan simbol tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat seperti apa yang terjadi di dunia barat.

---

<sup>23</sup> Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, hlm. 124.

<sup>24</sup> Asef Bayat, hlm. 128.

<sup>25</sup> Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*, hlm. 92.

Apabila dilihat dari konsep, pergeseran gerakan dan pemahaman islam di Indonesia dari Islamisme menuju Post-Islamisme bukan berarti ada penolakan terhadap Islamisme, akan tetapi evaluasi atas Islamisme yang gagal dengan tujuannya dengan lebih terbuka dengan realitas politik yang ada. Sehingga Post Islamisme menjadi Sintesa atas Islamisme dan globalisasi. Alat ukur yang menjadi gagalnya Islamisme dapat dilihat dari identiknya dengan aksi terorisme, perang yang berkepanjangan di timur tengah juga berimbas kepada Indonesia secara ideologi. Dari evaluasi atas Islamisme kemudian muncul kesimpulan bahwa agama tidak lagi menjadi hambatan berarti bagi perkembangan tindakan politik di masa depan. Kekuasaan akan terus berkompromi dengan agama dalam berbagai cara. Hal ini penting mengingat fakta bahwa Post-Islamisme meresap baik dalam tradisi akademik maupun kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam hal ruang publik agama akan menjadi ruang demokrasi yang sekuler, liberal dan homogen.<sup>26</sup> Agama akan terus mengalami perubahan interpretasi mengikuti realitas politik.

Kegagalan yang telah dialami oleh kelompok-kelompok Islamis sepanjang waktu telah menjadi sumber pengetahuan berharga bagi para aktivis politik yang mengadvokasi prinsip-prinsip Islam. Mereka telah mengambil hikmah dari ketidakberhasilan praktik politik yang berhubungan dengan Islam di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk tetapi tidak terbatas pada Turki dan Mesir. Melalui pengalaman ini, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mereka berusaha untuk memetik pelajaran yang akan membantu mereka dalam merancang pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam politik. Mengambil pengajaran dari situasi di negara-negara tersebut, para aktor Islamis telah mendapati keharusan untuk beradaptasi dengan pemerintahan setempat dan berupaya mengubah arah pergerakan mereka.<sup>27</sup>

Pandangan post-Islamis juga diterima oleh para aktivis politik Islam sebagai suatu model politik Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi politik modern. Setidaknya, mereka tetap mempertahankan unsur-unsur formalistik dan simbolis dalam tindakan-tindakan Islamis, seperti pakaian, serta merespons isu-isu yang populer di kalangan umat, seperti dukungan terhadap aksi bela Islam dan dukungan terhadap Palestina. Hal ini dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan keyakinan dan solidaritas bersama.

---

<sup>26</sup> Bani Syarif Maula, "Post-Islamisme Dan Gerakan Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 90–116.

<sup>27</sup> Syahrir Karim, "Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 119.



Bagi kaum Islamis, konsep Islamisme tidak menganggap demokrasi sebagai tujuan utama. Mereka melihat penerimaan terhadap demokrasi oleh sebagian kalangan Islamis sebagai semacam strategi untuk meraih kekuasaan politik. Ada kekhawatiran bahwa mereka yang menerima demokrasi sebenarnya hanya akan menggunakan hak suara dalam satu kali pemilihan, dan setelah itu mengabaikannya. Pandangan ini mengisyaratkan adanya tujuan tersirat untuk menggantikan demokrasi dengan sistem teokrasi jika mereka berhasil memenangkan pemilihan.

Fenomena post-Islamisme setidaknya memberikan kritik terhadap prevalensi tindakan politik yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam sepanjang waktu, di mana agama seringkali hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih kekuasaan oleh mereka yang terlibat dalam gerakan Islamis. Kaum Islamis, juga dikenal sebagai penganut Islamisme, telah memberikan panggung bagi kekuatan-kekuatan politik yang ingin membentuk aliansi sementara, yang pada akhirnya menyebabkan agama menjadi korban. Para elit dalam lingkungan Islamisme setidaknya memperoleh hasil dari upaya perjuangan ini, yang seringkali berujung pada pemanfaatan kelompoknya sendiri maupun diri mereka sendiri.

Kondisi ini muncul karena kurangnya kemampuan aktivis Islam untuk mengembangkan konsep yang solid dalam menghubungkan Islam dengan konteks sosial-politik saat ini. Mereka sering terjatuh dalam politik pragmatis yang hanya mementingkan kepentingan sempit dan kesulitan dalam merumuskan konsep yang kokoh.

## **KESIMPULAN**

Gerakan salafi klasik awalnya memiliki semangat dan spirit pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk khurafat tradisi dan segala bentuk amaliyah yang berbau bid'ah dan tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist nabi serta. Kemudian salafi klasik bergeser menjadi salafi kontemporer atau sering disebut dengan kelompok Islam fundamentalis. Kelompok ini memiliki tujuan dan spirit yang sama dengan kelompok sebelumnya. Namun kelompok ini dapat diidentifikasi dengan ciri penafsiran teks-teks suci Al Qur'an dan Hadist secara tekstual rigid dan kaku.

Kedua gerakan ini awalnya hanya fokus pada spirit pemurnian Islam dari segala bentuk khurafat dan amaliyah yang bersifat bid'ah dan tidak menyentuh dimensi politik dan kekuasaan. Atas perubahan zaman dan ketidakpuasan dengan sistem demokrasi yang diidentikkan dengan sistem Barat yang menurut mereka tidak memiliki solusi dalam kemunduran aspek ekonomi politik budaya dan kesehatan, maka kelompok ini mulai menyentuh dimensi politik dan

kekuasaan dengan spirit mendirikan negara islam. Kelompok inilah yang dinamakan dengan kelompok gerakan islamis. Kelompok islamis ini identik dengan tujuan mendirikan negara islam dan menerapkan syariah islam sebagai hukum dalam suatu negara dan pemerintahan.

Gerakan ini mulai masuk ke Indonesia setelah tumbangya rezim orde baru dan dibukanya keran ruang ekspresi. Dari sinilah lahir organisasi islamis seperti HTI, FPI, KAMMI dan lain. Gerakan islam di Indonesia mulai masuk kepada gerakan Post-Islamis karena. Dibuktikan dengan evaluasi beberapa partai politik islam dengan menjadikan islam moderat sebagai ideologi partainya.

Aktivisme Islamisme berusaha untuk memetik pelajaran dari kejadian timur tengah yang akan membantu mereka dalam merancang pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam politik. Mengambil pengajaran dari situasi di negara-negara tersebut, para aktor Islamis telah mendapati keharusan untuk beradaptasi dengan pemerintahan setempat dan berupaya mengubah arah pergerakan mereka. Pergerakan yang cepat dari gerakan Islamis menuju Post-Islamis di Indonesia disebabkan oleh karakteristik bangsa Indonesia yang sangat pluralis. Sehingga mengharuskan masyarakatnya terbuka dan menerima perbedaan namun tetap tidak menghilangkan semangat keislamannya. Maka Post-Islamis di Indonesai disebut sebagai sintesa dari Islamisme dan globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akbar S. *Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise*. New York: Routledge, 1992.
- Asef Bayat. *Pos-Islamisme*. Yogyakarta: LKis, 2011.
- Bruinessen, Martin V an. "Indonesian Muslims In A Globalising World Westernisation Arabisation and Indigenising Responses." *RSiS Working Paper, S. Rajaratnam School of International Studies*, no. May (2018).
- Bruinessen, Martin van. "Muslim Fundamentalism: Something to Be Understood or to Be Explained Away." *An Antology of Islamic Studies* Vol. 2 (2008): hlm. 90.
- Burhani, Ahmad Najib. "Aksi Bela Islam : Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Maarif Institute* Vol. 11, no. No. 2 (2016): 15–29.
- Chaplin, Chris. *Salafism and the State Islamic Activism and National Identity in Contemporary Indonesia*. Copenhagen: Nias Press, 2021.
- Esposito, John L. "Salafiyah." *Oxford University Press* 5 (1995): 105.
- Gellner, Ernest. *Postmodernisme, Reason and Religion*. London: Rotledge, 1992.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3S & KITLV, 2008.
- — —. "Salafisme, Education and Youth Saudi Arabia's Campaign For Wahabism in Indonesia." *Oxford University Press*, 2022, 135–57.
- Hasyim, Syafiq. "Fundamentalisme Islam: Perebutan Dan Pergeseran Makna." *Tashwirul Afkar* 1 (2002): hlm. 8.
- Isma, Neng, Nur Holifah, Nur Fajriyah Amini, and Salis Nur Rois. "Islam Dan

- Fundamentalisme Dalam Al ' Qur ' an" 2, no. 1 (2023): 1299–1310.
- Kamsi, H. "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara." *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Karim, Syahrir. "Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 119.
- Kepel, Gilles. *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi Di Dunia Modern*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Komaruddin Hidayat. *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam Di Bumi Nusantara*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin, Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2022.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Islam Dan Konsepsi Kontemporer Mnegenai Negara: Gagasan Jama'at Al-Islami Di Pakistan Dan Masyumi Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Maula, Bani Syarif. "Post-Islamisme Dan Gerakan Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 90–116.
- Suharto, Babun. "Articulation of the Archipelago's Islamic Education Thought." *International Journal of Islamic Boarding School* Vol. 1, no. No. 1 (2023): 57–66.